

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ash Shofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayan Publik, Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah, Editor, Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Cat. 3, Ed. Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lukman Hakim, Em. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurbaningsih, Enny. 2017. *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, et al. 2020. *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Raminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.

JURNAL

Anggraini, Tri. (2019). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Musi Banyuasin Studi Kasus:(Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA)). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 11, Nomor 2.

Arrum, Desi Arianing. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia. *Jurist-Diction*. Vol. 2, Nomor 5.

Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. (2019). Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah.
Diponegoro Law Journal. Vol. 8, Nomor 2.

Ilyas, A., Arisaputra, M. I., Arifin, A., & Bakar, D. U. M. (2020). Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 4 No. 2.

RIDO, RIDO, Aslamaturrahmah Dwi Putri Nur, and Sophia Uly. (2019). Efektivitas Pelayanan Samsat Bergerak (Samber) Di Kota Tanjungpinang Tahun 2018. Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Shandi Izhandri, S. H., et al. OSS dan Perkembangannya di Indonesia.

S.F. Marbun. (2013). *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press. Cetakan 1.

Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 2. No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Izin Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kode Etik Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar.

SUMBER LAIN

Wawancara dengan Kadis dan Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar